



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI  
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

---

Tahun Sidang	: 2023 - 2024
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke-	: 4
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 17 Januari 2024
Waktu	: Pukul 15.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: 1. Konsultasi Rancangan Peraturan KPU; 2. Konsultasi Rancangan Peraturan Bawaslu; 3. Membicarakan hal-hal faktual; 4. Dan lain-lain.
Ketua Rapat	: <b>H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/ Ketua Komisi II DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Dahliya Bahnan, S.H., M.H./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 23 (dua puluh tiga) Anggota Komisi II DPR RI dari 48 (empat puluh delapan) Anggota Komisi II DPR RI B. Ketua KPU C. Ketua Bawaslu D. Ketua DKPP E. Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri

**I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Ketua DKPP, dan Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri RI, dengan agenda konsultasi Rancangan Peraturan KPU, konsultasi Rancangan Peraturan Bawaslu, membicarakan hal-hal faktual, dan lain-lain, hari Rabu, 17 Januari 2024, dibuka pukul 17.25 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN**

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Ketua DKPP, dan Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri RI, dengan agenda konsultasi Rancangan Peraturan KPU, konsultasi Rancangan Peraturan Bawaslu, membicarakan hal-hal faktual, dan lain-lain, yaitu:

1. Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (R-PKPU) tentang:
  - a. Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
  - b. Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
  - c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
  - d. Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.
  - e. Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
2. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) sebagai berikut:
  - a. Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
  - b. Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar Negeri.

## **III. KESIMPULAN RAPAT**

Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Ketua DKPP, dan Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri RI, dengan agenda konsultasi Rancangan Peraturan KPU, konsultasi Rancangan Peraturan Bawaslu, membicarakan hal-hal faktual, dan lain-lain, sebagai berikut:

Komisi II DPR RI bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU RI) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) menyetujui:

1. Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (R-PKPU) tentang:
  - a. Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
  - b. Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
  - c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
  - d. Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.
  - e. Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
  
2. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) tentang:
  - a. Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
  - b. Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar Negeri.

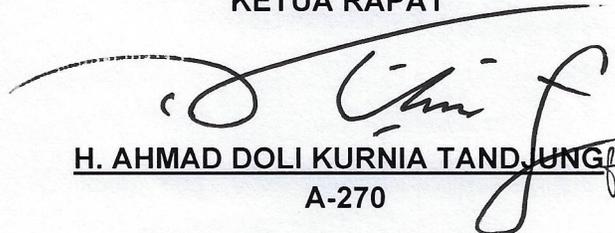
Dengan catatan agar KPU RI dan Bawaslu RI memperhatikan saran dan masukan dari Anggota Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, dan DKPP RI.

#### IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 19.38 WIB.

Jakarta, 17 Januari 2024

KETUA RAPAT



**H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG**  
A-270